

Perjuangan Demokrasi Masyarakat Sipil Dewasa Ini¹

Fransiska Widyawati

Unika St. Paulus Ruteng

fwidyawati10@gmail.com

Pendahuluan

Selamat siang. Ijinkan saya pertama-tama mengucapkan apresiasi kepada Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat (YAPPIKA) bersama Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) menginisiasi Program BASIS (Building Enabling Environment and Strong Civil Society in Indonesia) dan Unika Santu Paulus Ruteng atas penandatanganan MoU pada hari ini. Ini bentuk komitmen bersama bagi penguatan demokrasi yang mendorong keterlibatan masyarakat sipil. Para pembicara terdahulu dari YAPPIKA dan SEPAHAM berkeahlian dan sekaligus sangat berpengalaman dalam isu ini, dan ini terlihat dari paparan yang disajikan. Terima kasih atas pencerahan luar biasa.

Ijinkan saya membacakan oret-oretan saya sebagai sumbangan pemikiran pada diskusi hari ini.

Pertama, secara historis, kejatuhan rezim orde Baru yang opresif dan otoriter menjadi era kebangkitan demokrasi Indonesia. Liberalisme sistem partai, pemilu dan Pilkada langsung, reformasi hukum, serta pemberdayaan masyarakat sipil adalah contoh buah reformasi. Reformasi juga mendorong gerakan sosial dan sipil yang berperan penting dalam reformasi demokratis dan hak asasi manusia di Indonesia. Reformasi selanjutnya mendorong penguatan demokrasi dari sentralistis menjadi desentralisasi, membangun kesadaran untuk menggunakan kekuatan protes masa dan demonstrasi sebagai strategi perubahan politik dan akuntabilitas; membentuk koalisi memperkuat suara mereka dan meningkatkan dampaknya. Koalisi menyatukan berbagai kelompok dan elemen di dalam masyarakat seperti serikat pekerja, kelompok hak-hak perempuan, dan aktivis lingkungan, dll untuk mengadvokasi tujuan bersama. Banyak organisasi masyarakat sipil Indonesia telah mencari dukungan dan bermitra secara internasional untuk memperkuat advokasi dan kerja sama global.

¹ Artikel ini disampaikan dalam Seminar Dengan Tema: *Kebebasan Masyarakat Sipil: Strategi Dan Tantangan Di Era Demokrasi*; 24 Februari 2025

Kedua, meskipun ada banyak capaian positif, namun tidak dapat dipungkiri, organisasi masyarakat sipil termasuk juga pers kerap menghadapi represi politik dan pembatasan kegiatan mereka. Berdasarkan data Freedom House, indeks demokrasi Indonesia turun dari 62 poin pada 2019 menjadi 53 poin pada 2023. Data Reporters Without Borders (RSF) juga menunjukkan penurunan terhadap skor kebebasan pers Indonesia, yakni dari 63,23 poin pada 2019 menjadi 54,83 poin pada 2023. Hal ini menimbulkan keawatiran akan masa depan demokrasi. Menurut Vedi. R. Hadiz (2021), kemunduran demokrasi yang kita alami selama masa beberapa tahun terakhir ini merupakan akibat logis dari perkembangan demokrasi yang prosedural dan mengabaikan prinsip-prinsip substansial. Akibatnya, demokrasi Indonesia selalu berada dalam cengkeraman oligarki dan hanya melayani kepentingan para elite.

Menurut Törnquist (2013)² demokrasi yang diperkenalkan pasca orde baru terjebak pada aspek prosedural sehingga tidak banyak mengubah kehidupan sosial politik yang lebih substantif. Hal ini ditandai dengan meskipun terjadi perubahan infrastruktur kelembagaan politik dan perimbangan kekuasaan yang lebih demokratis, tetapi ide representasi masih lemah karena dimonopoli oleh aktor dominan sementara kekuatan sipil society tidak menunjukkan kekuatan yang berarti sebagai penyeimbang dominasi kekuasaan negara dan elite politik. Bahkan banyak aktivis dari kalangan masyarakat sipil berhasil masuk ke lembaga politik karena mempolitisasi masyarakat sipil.

Ketiga, selain karena represi sistematis struktural, saya melihat ada banyak tantangan lainnya dalam perwujudan peran masyarakat sipil untuk menjadi agen demokrasi. Beberapa di antaranya:

1. **Pembatasan Hukum dan Regulasi:** Pemerintah terkadang mengeluarkan undang-undang atau peraturan yang dapat membatasi kebebasan masyarakat sipil, seperti pembatasan kebebasan berekspresi, berpendapat atau pembatasan hak untuk berkumpul dan berserikat. Beberapa aturan seperti UU Penistaan Agama atau ITE dapat menjadi ambigu untuk pemberangusan suara kritis.
2. **Represi dan Kekerasan:** Aktivis masyarakat sipil atau kelompok yang kritis terhadap pemerintah terkadang menghadapi tindakan represi atau kekerasan, seperti intimidasi, penangkapan, atau bahkan tindakan kekerasan fisik. Kasus jurnalis yang ditembak, dipukul, dll masih ada saja kita dengar.

² Törnquist, O. (2013). *Assessing dynamics of democratisation: Transformative politics, new institutions, and the case of Indonesia*. New York: Palgrave Macmillan.

3. **Kooptasi dan Ketergantungan:** Pemerintah atau pihak-pihak tertentu terkadang mencoba untuk melakukan kooptasi terhadap organisasi masyarakat sipil dengan memberikan bantuan atau dukungan finansial. Hal ini dapat mengurangi independensi dan kebebasan organisasi masyarakat sipil. Konsensi tambang, pembiayaan kegiatan religius keagamaan, riset, dan dana-dana lainnya bisa membuat orang menutup mulut terhadap ketidakadilan yang dilakukan pemerintah atau pemberi dana.
4. **Polarisasi dan Disinformasi:** Polarisasi politik dan penyebaran disinformasi dapat menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi kebebasan masyarakat sipil. Hal ini dapat menghambat partisipasi publik dan memperlemah solidaritas antar kelompok masyarakat sipil.
5. **Kemiskinan, Ketimpangan Ekonomi dan SDM:** Ketidakberadaan ekonomi membuat orang sulit mengadvokasi demokrasi. Bahkan Karl Marx mengatakan “kemiskinan adalah tanda paling nyata demokrasi itu belum ada”. Penguasa memanfaatkan situasi ini dengan membeli dengan menjadikan mereka sasaran empuk money politics atau penyogokkan. Orang miskin sendiri dapat menerima hal itu dengan suka cita, suara dan daya kritis kerap tidak lebih bermakna dari pada asupan uang atau bantuan yang lebih urgen kendati harus mengorbankan hak suara dan demokrasi.
6. **Budaya Feodalisme, Elitisme, Patriarkalisme dan Senioritas;** Demokrasi tidak berjalan kalau kesetaraan tidak tercapai. Saya memandang hal ini semakin kuat di dalam masyarakat. Budaya hormat berlebihan pada pejabat, pandangan pejabat sebagai penguasa dari pada pelayan, gila hormat, dan kaum elit yang nyaman dengan segala bentuk penghormatan, menyulitkan dialog terbuka, setara, dan tidak menciptakan cara berpikir kritis. Orang lebih suka dihormati dan anti kritik. Penerimaan dan penyambutan berlebihan, acara-acara yang dominan menampilkan pejabat dari pada diskusi itu sendiri, menyulitkan untuk membuka ruang diskusi yang demokratis
7. **Individualisme, nyaman dengan capaian diri:** Ada banyak orang merasa sudah nyaman dengan capaian dan hidupnya sendiri sehingga merasa tidak terlalu perlu untuk peduli pada masalah sosial dan kemajuan demokrasi. Dewasa ini tidak mudah menemukan pejuang yang gigih dan rela berkorban untuk membela kepentingan pihak lain yang tersingkir.

8. **Kedangkalan, kegembiraan dan bukan substansi dan perjuangan;** dunia makin suka yang hura-hura dan malas berpikir masalah orang lain. Pejuang yang minim. Daya juang bagi orang lain semakin menipis. Tidak ada yang benar-benar berani menyuarakan kritis dan kontra pada kekuasaan. Mencari aman, dari pada akan dihalangi, lebih baik diam saja.
9. **Mandulnya Peran Ormas dalam Perjuangan Demokrasi:** Ormas menjadi mandul dan cenderung diam.

10. Religiusitas dan Kesopanan Semu

Orientasi religius yang dangkal; Agama tidak berfungsi kritis; kesalehan personal yang tidak berdampak sosial; Agama dipakai kelompok elite untuk kolaborasi tak wajar

Keempat, untuk dapat mewujudkan kekuatan masyarakat sipil, beberapa prinsip yang harus selalu dihidupkan adalah:

1. **Prinsip kesetaraan (principle of equality).** Artinya, sebuah tatanan demokratis harus memfasilitasi hak semua warga negara untuk berpartisipasi secara politis. Warga sebuah masyarakat demokratis tidak boleh mengancam atau memaksa yang lain dalam proses pemilihan. Negara juga harus menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi setiap warga negara tanpa harus merasa takut terhadap intimidasi.
2. **Prinsip kewarganegaraan yang inklusif.** Prinsip inklusif menolak segala bentuk diskriminasi atas dasar gender, kelas sosial, ras, harta kekayaan dan perimbangan lainnya. Demokrasi membuka ruang seluas-luasnya bagi semua warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih atau mencalonkan diri guna mendapatkan jabatan dalam pemerintahan. Praktik politik dinasti yang marak terjadi di Indonesia adalah hambatan bagi terbentuknya kewarganegaraan yang inklusif.
3. **Hak-hak minoritas.** Sebuah negara demokratis harus memastikan bahwa kelompok minoritas entah itu minoritas kultural, etnis, religius atau bentuk minoritas lainnya tidak dilarang secara hukum untuk mengekspresikan pandangan dan kepentingannya dalam seluruh proses politik. Negara juga harus memastikan bahwa kelompok-kelompok minoritas dapat mengekspresikan hak-hak kulturalnya.

4. **Prinsip negara hukum (the rule of law).** Prinsip negara hukum bertujuan untuk melindungi setiap warga negara dari praktik kekuasaan yang sewenang-wenang dan menegaskan bahwa hukum berlaku untuk setiap orang secara setara termasuk bagi para pemengku kekuasaan. The rule of law memastikan bahwa hukum berlaku secara fair dan setara serta menjamin bahwa tak seorang pun berdiri di atas hukum. Karena itu, prinsip imparsialitas dalam penegakan hukum merupakan sesuatu yang berlaku absolut. Hukum tidak pernah menjadi senjata politik untuk membungkam oposisi atau suara kritis dalam masyarakat sipil.
5. **Pemilihan umum.** Elemen esensial demokrasi mencakupi sistem pemilihan umum yang bebas dan fair. Para calon yang memenuhi syarat dapat mencalonkan diri untuk jabatan-jabatan politis lewat proses pemilihan umum yang kompetitif. Sebuah negara yang demokratis harus memastikan adanya kesempatan yang setara bagi semua warga negara yang memenuhi syarat untuk mengambil bagian dalam proses tersebut serta memastikan bahwa penyelenggara pemilu menjadi wasit yang netral.

Penutup

Demikian beberapa gagasan yang sebenarnya tidak asing bagi semua kita. Mari kita lanjutkan dengan diskusi

Terima kasih